



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110  
Tlp. (021) 3524260, 348 30931, Fax. (021) 348 30931, Web.: [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

Jakarta, 5 Februari 2025

Nomor : 900.1.3/530/SJ  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Penilaian Indikator  
Kinerja Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA) Tahun  
2024

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal;  
4. Kepala Badan; dan  
5. Rektor IPDN.  
di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, telah dilakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2024 lingkup Kementerian Dalam Negeri. Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas implementasi perencanaan penganggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Penilaian sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terhadap 160 Satuan Kerja Lingkup Kemendagri yang datanya bersumber dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kementerian Keuangan. Nilai akhir IKPA Kemendagri Tahun 2024 adalah **94,89** atau **turun sebesar 0,48 point** dibandingkan Tahun 2023 yaitu **95,37** dan **tidak mencapai** target Tahun 2024 yaitu sebesar 96.

Dari hasil penilaian IKPA Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, terdapat beberapa Indikator yang nilainya kurang optimal, yaitu:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran
  - a. **Revisi DIPA**, mendapatkan nilai 9,99 dari nilai bobot 10. Tidak maksimalnya nilai revisi DIPA diakibatkan adanya 3 revisi DIPA yang termasuk dalam perhitungan IKPA yang terjadi di semester 2 pada Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa; dan
  - b. **Deviasi Halaman III DIPA**, mendapatkan nilai 13,56 dari nilai bobot 15 yang diakibatkan adanya penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang mencapai 9,62% dari batas toleransi deviasi 5%. Adapun Satker yang deviasinya diatas 25% berjumlah 118 satker yaitu pada DKPP dan 117 Satker Dekon/TP Ditjen Adwil.
2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran
  - a. **Penyerapan Anggaran**, mendapatkan nilai 18,24 dari nilai bobot 20 yang diakibatkan oleh tidak tercapainya target penyerapan yang dinilai setiap triwulan oleh sebagian besar satker lingkup Kemendagri. Adapun Satker yang nilainya berada dibawah rata-rata Kemendagri berjumlah 79 satker yaitu pada Ditjen Dukcapil, Ditjen Pemdes dan 77 Satker Dekon/TP Ditjen Adwil;

- b. **Belanja Kontraktual**, mendapatkan nilai 9,6 dari nilai bobot 10 yang diakibatkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN dan kurangnya upaya akselerasi belanja kontraktual pada satker. Adapun 8 satker yang mengalami hal tersebut yaitu BPSDM, Setjen, PPSDM Makassar, IPDN Jatinangor, Ditjen Bangda, Ditjen Dukcapil, DKPP, dan Ditjen Pemdes;
  - c. **Penyelesaian Tagihan**, mendapatkan nilai 9,95 dari nilai bobot 10 yang diakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan langsung (LS) Kontraktual yang diajukan ke KPPN melewati 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP). Adapun terdapat total 17 keterlambatan dari total 3.514 penyampaian kontrak ke KPPN dan satker yang mengalami hal tersebut yaitu Ditjen Dukcapil, Setjen, BPSDM, Ditjen Bangda, Ditjen Pemdes, dan Setda Provinsi Jabar; dan
  - d. **Pengelolaan UP dan TUP**, mendapatkan nilai 9,67 dari nilai bobot 10 yang diakibatkan keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) oleh 64 satker, khususnya pada Satker BSKDN, Balai Pemdes Malang, Ditjen Pemdes, Ditjen Polpum, Itjen, IPDN Sulsel, IPDN Sulut, PPSDM Makassar, dan 56 Satker Dekon/TP Ditjen Adwil.
3. **Aspek Kualitas Hasil**  
**Capaian Output**, mendapatkan nilai 24,38 dari bobot 25 diakibatkan 15 satker yang nilainya tidak maksimal yaitu Setjen, Ditjen Bangda, Balai Pemdes Lampung, dan 12 satker dekonsentrasi Ditjen Bina Adwil. Adapun terdapat 9 satker dekonsentrasi Ditjen Bina Adwil yang nilainya 0.
4. **Dispensasi SPM**, ada 2 dispensasi SPM yang terdapat pada Ditjen Pemdes dan IPDN Kampus Sulut yang menjadi faktor pengurang nilai IKPA sebesar 0,5 poin.

Jika dilihat dari nilai keseluruhan indikator di masing-masing satker, terdapat **33 satker yang prestasi kinerja yang sangat baik** dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemendagri (nilai  $\geq 96$ ) yaitu 22 Satker Kantor Pusat/UPT dan 10 Satker Dekon/TP Ditjen Bina Adwil.

Sedangkan **127 satker yang perlu mendapatkan perhatian** dan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerjanya (nilai  $\geq 96$ ) yaitu: IPDN Sulut (94,79), DKPP (92,55), Ditjen Dukcapil (92,12), Ditjen Pemdes (90,49) dan 127 Satker Dekon/TP Ditjen Bina Adwil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di Tahun 2025 khususnya untuk Triwulan I, bersama ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah strategis perbaikan kinerja, sebagai berikut:

- 1. Melakukan penyerapan anggaran 17% sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I);
- 2. Melakukan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA Triwulan I dengan batas akhir adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Februari 2025;
- 3. Menginventarisir pekerjaan kontraktual yang belum dilaksanakan, segera memproses pengadaan barang/jasa, melakukan pendaftaran data kontrak, dan melakukan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan;

4. Menghindari keterlambatan penyelesaian tagihan dan keterlambatan pengajuan penggantian UP/TUP;
5. Menyampaikan data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan memastikan Progres Capaian Rincian Output (PCRO) atau Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) berdasarkan target setiap bulannya yang ditetapkan oleh satker;
6. Melakukan proses input data Target PCRO dan Target RVRO Bulanan di Aplikasi SAKTI pada awal tahun dan dapat dimutakhirkan sesuai dengan periode Pemutakhiran Halaman III DIPA;
7. Memerintahkan PPK untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban dan menguji kebenarannya pada setiap tagihan yang diajukan ke KPA;
8. Intensifkan pemantauan dan pengendalian terhadap permasalahan pengelolaan keuangan serta lakukan koordinasi penyelesaian dengan instansi terkait (internal/eksternal); dan
9. Bagi Unit Kerja Eselon I yang memiliki satuan kerja daerah (Balai Pemdes, PPSPDM, IPDN Kampus Daerah, Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) agar memerintahkan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai bahan keperluan manajerial, terlampir disampaikan nilai IKPA Tahun 2024 Satker Lingkup Kemendagri yang bersumber dari Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pt. Sekretaris Jenderal,  
  
Tomsi Tohir

Tembusan:

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan



NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024  
SATKER KANTOR PUSAT DAN UPT LINGKUP KEMENDAGRI

Urutan berdasarkan Satker Terbaik

No	Uraian Satker	Perencanaan		Pelaksanaan				Hasil	Dispensasi SPM (pengurang)	Nilai IKPA 2024
		Revisi DIPA	Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Selesai Tagihan	UP dan TUP	Capaian Output		
		10	15	20	10	10	10	25		
1	BALAI PEMDES YOGYA	10	15	20	10	10	10	25	0	100
2	IPDN PAPUA	10	15	20	10	10	9.98	25	0	99.98
3	DITJEN OTDA	10	15	19.97	10	10	9.99	25	0	99.96
4	DITJEN KEUDA	10	15	19.96	10	10	10	25	0	99.96
5	IPDN KALBAR	10	15	20	10	10	9.96	25	0	99.96
6	BALAI PEMDES MALANG	10	15	20	10	10	9.91	25	0	99.91
7	PPSDM BANDUNG	10	15	19.89	10	10	10	25	0	99.89
8	DITJEN POLPUM	10	15	20	10	10	9.83	25	0	99.83
9	IPDN SULSEL	10	15	19.95	10	10	9.84	25	0	99.79
10	ITJEN	10	15	19.96	10	10	9.77	25	0	99.74
11	IPDN SUMBAR	10	14.04	20	10	10	10	25	0	99.04
12	BPSDM	10	15	19.93	9.2	9.88	10	25	0	99.02
13	SETJEN	10	15	19.95	9.65	9.92	9.81	24.59	0	98.92
14	BALAI POL PP DAN DAMKAR	10	13.89	20	10	10	9.99	25	0	98.88
15	IPDN NTB	10	14.08	19.63	10	10	9.76	25	0	98.48
16	PPSDM MAKASSAR	10	14.03	20	9.6	10	9.68	25	0	98.31
17	IPDN JATINANGOR	10	13.99	20	9.41	10	9.91	25	0	98.31
18	PPSDM YOGYA	10	13.29	19.84	10	10	10	25	0	98.13
19	BSKDN	10	13.97	20	10	10	9.04	25	0	98
20	DITJEN BANGDA	10	13.88	19.6	9.9	9.97	10	24.29	0	97.63
21	PPSDM BUKITTINGGI	10	13	19.56	10	10	9.94	25	0	97.5
22	BALAI PEMDES LAMPUNG	10	15	20	10	10	10	22.5	0	97.5
23	IPDN SULUT	10	12.81	18.97	10	10	8.76	25	0.75	94.79
24	DITJEN ADWIL	10	12.36	19.61	10	9.92	9.36	22.59	0	93.84
26	DKPP	10	9.39	19.56	9.67	10	8.93	25	0	92.55
25	DITJEN DUKCAPIL	10	12.35	15.69	9.53	9.99	9.56	25	0	92.12
27	DITJEN PEMDES	8	12.13	17.07	9.48	9.76	9.79	25	0.75	90.49
KEMENDAGRI		9.99	13.56	18.24	9.6	9.95	9.67	24.38	0.5	94.89

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan per tanggal 16 Januari 2024 Pukul 10.00 WIB



PAGU DAN REALISASI + BLOKIR BELANJA SATKER T.A. 2024  
SATKER ESELON 1 LINGKUP KEMENDAGRI

Urutan berdasarkan Satker dengan Realisasi Terbesar

NO	Nama Satker	Total				
		Pagu	Real	Blokir	%	Sisa
1	DITJEN POLPUM	221,138,641,000	220,412,541,101	668,459,000	99.97%	57,640,899
2	ITJEN	88,732,681,000	88,199,661,002	451,967,000	99.91%	81,052,998
3	IPDN	602,603,761,000	601,643,081,631	297,861,000	99.89%	662,818,369
4	BPSDM	230,806,716,000	229,334,445,297	875,768,000	99.74%	596,502,703
5	DKPP	76,268,173,000	75,723,751,229	170,119,000	99.51%	374,302,771
6	DITJEN OTDA	95,012,875,000	90,903,206,981	3,365,057,000	99.22%	744,611,019
7	SETJEN	663,728,823,000	656,475,342,710	1,108,902,000	99.07%	6,144,578,290
8	DITJEN DUKCAPIL	1,278,777,600,000	1,261,683,882,407	4,505,424,000	99.02%	12,588,293,593
9	DITJEN KEUDA	110,137,836,000	107,327,986,566	1,605,257,000	98.91%	1,204,592,434
10	DITJEN ADWIL	224,738,969,000	210,789,633,085	10,916,820,000	98.65%	3,032,515,915
11	BSKDN	55,559,478,000	54,554,886,362	157,965,000	98.48%	846,626,638
12	DITJEN BANGDA	343,644,826,000	325,673,935,667	10,091,059,000	97.71%	7,879,831,333
13	DITJEN PEMDES	1,214,621,448,000	1,092,314,512,756	6,075,935,000	90.43%	116,231,000,244
KEMENDAGRI		5,205,771,827,000	5,015,036,866,794	40,290,593,000	97.11%	150,444,367,206

Biro Keuangan & Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri  
Sumber : Data OM-SPAN Kemenkeu tanggal 20 Januari 2025 pukul 10.00 WIB